



Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I 2024

DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Kata Pengantar



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan periode Triwulan I Tahun 2024 ini dengan baik. Substansi yang tertuang di dalam laporan kinerja ini adalah segala pelaksanaan kegiatan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari pelaporan kinerja ini adalah : 1) memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; serta 2) sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun laporan ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan. Masukan untuk penyempurnaan sangat kami harapkan untuk penyusunan laporan periode selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian. Terima kasih.

Jakarta, 26 April 2024

Direktur Perizinan dan Kenelayanan



Ukon Ahmad Furkon

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	MAKSUD DAN TUJUAN	
1.3	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
1.3.1	TIM KERJA TATA PERIZINAN	4
1.3.2	TIM KERJA HARMONISASI DAN PEMANTAUAN PERIZINAN	
1.3.3	TIM KERJA PERLINDUNGAN NELAYAN	
1.3.4	TIM KERJA PEMBERDAYAAN NELAYAN	
1.3.5	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL	7
1.3.6	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	7
1.4	SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB 2	PERENCANAAN KINERJA	11
2.1	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024	9
2.2	SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN	10
2.3	RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA	10
BAB 3	AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
3.2	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	15
3.2.1	PENGLOLAAN KENELAYANAN MAJU DAN BERDAYA SAING	15
IKU 1	PERSENTASE KELOMPOK USAHA BERSAMA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA	
IKU 2	PERSENTASE NELAYAN YANG MEMILIKI KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN (KUSUKA) BIDANG PENANGKAPAN IKAN	
IKU 3	KAMPUNG NELAYAN YANG DIKEMBANGKAN DAN DIFASILITASI PENATAANNYA MELALUI PROGRAM KAMPUNG NELAYAN MAJU (KALAJU)	
IKU 4	NELAYAN YANG DIFASILITASI KEPEMILIKAN TANAHNYA MELALUI PROGRAM SERTIFIKASI TANAH NELAYAN	
IKU 5	PERSENTASE NELAYAN YANG TERLINDUNGI	
3.2.2	PENGLOLAAN PERIZINAN SESUAI KETENTUAN	16
IKU 6	ALOKASI PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN YANG DITERBITKAN	

	IKU 7	DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN SUB SEKTOR PENGANGKUTAN IKAN SERTA SERTIFIKATB KUOTA PENANGKAPAN IKAN YANG DITERBITKAN	
	IKU 8	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENAGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN YANG DITINDAKLANJUTI	
	IKU 9	INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN	
	IKU 10	PERSENTASE KETERSEDIAAN APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN	
	IKU 11	PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN TERKAIT APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENAGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN	
	IKU 12	PERSENTASE PROVINSI YANG DIFASILITASI PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN KEWENANGAN GUBERNUR	
3.2.3		KORPORASI NELAYAN YANG DIKEMBANGKAN	
	IKU 13	KELOMPOK NELAYAN YANG TERBENTUK MENJADI KELEMBAGAAN KORPORASI NELAYAN	
3.2.4		TENAGA KERJA YANG TERLIBAT PADA PENGELOLAAN DIT. PDK	19
	IKU 14	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT PADA PENGELOLAAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	

3.2.5		TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DILINGKUNGAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	21
	IKU 15	IP ASN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
	IKU 16	NILAI REKONSILIASI KINERJA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
	IKU 17	PERSENTASE UNIT DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR	
	IKU 18	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
	IKU 19	TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS / STRATEGIS DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
	IKU 20	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
	IKU 21	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN	
3.3		AKUNTABILITAS KEUANGAN	

PENUTUP

DATA DUKUNG

DAFTAR TABEL

TABEL 1	RENCANA KINERJA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN TAHUN 2023
TABEL 2	KOMPOSISI ANGGARAN BERDASARKAN JENIS KEGIATAN TAHUN 2023
TABEL 3	RENCANA AKSI IKU PASCA VALIDASI TIM KERJA TAHUN 2023
TABEL 4	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS (SK) DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN PASCA VALIDASI TIM KERJA TAHUN 2023
TABEL 5	PERSENTASE KUB YANG MENINGKAT KAPASITASNYA
TABEL 6	PERSENTASE NELAYAN YANG MEMILIKI KARTU PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN (KUSUKA) BIDANG PENANGKAPAN IKAN
TABEL 7	KAMPUNG NELAYAN YANG DIKEMBANGKAN DAN DIFASILITASI PENATAANNYA MELALUI PROGRAM KAMPUNG NELAYAN MAJU
TABEL 8	NELAYAN YANG DIFASILITASI KEPEMILIKAN TANAHNYA MELALUI PROGRAM SERTIFIKASI TANAH NELAYAN
TABEL 9	PERBANDINGAN NELAYAN YANG DIFASILITASI KEPEMILIKAN TANAHNYA MELALUI PROGRAM SERTIFIKASI TANAH NELAYAN
TABEL 10	PERSENTASE NELAYAN YANG TERLINDUNGI
TABEL 11	ALOKASI PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 12	DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PERIZINAN BERUSAHA PENGANGKUTAN IKAN SERTA SERTIFIKAT KUOTA PENANGKAPAN IKAN YANG DITERBITKAN
TABEL 13	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN YANG DITINDAKLANJUTI
TABEL 14	INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 15	PERSENTASE KETERSEDIAAN APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 16	PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN TERKAIT APLIKASI LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN
TABEL 17	PERSENTASE PROVINSI YANG DIFASILITASI PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA SUB SEKTOR PENANGKAPAN IKAN DAN PENGANGKUTAN IKAN KEWENANGAN GUBERNUR
TABEL 18	TENAGA KERJA YANG TERLIBAT PADA PENGELOLAAN PDK
TABEL 19	INDEKS PROFESIONALITAS (IP) ASN LINGKUP DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 20	NILAI REKONSILIASI KINERJA DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 21	PERSENTASE UNIT DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN YANG MENERAPKAN MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR
TABEL 22	PERSENTASE HASIL REKOMENDASI PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 23	PERBANDINGAN CAPAIAN PERSENTASE HASIL REKOMENDASI PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN

TABEL 24	TINGKAT EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS / STRATEGIS DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 25	PERSENTASE PENYERAPAN ANGGARAN DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 26	NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN
TABEL 27	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 BERDASARKAN JENIS KEGIATAN

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIT. PDK
- GAMBAR 2 DASHBOARD KINERJAKU CAPAIAN KINERJA DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN
- GAMBAR 3 DASHBOARD APLIKASI KINERJAKU CAPAIAN TRIWULAN I DIT. PERIZINAN DAN KENELAYANAN TAHUN 2024
-
-

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 178.023.975.000,- yang tertuang pada DIPA Tahun 2024 dengan nomor Surat Pengesahan DIPA-032.03.1.238720/2024 Tanggal 15 November 2023. Untuk mencapai program yang telah direncanakan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2024, memiliki 5 Sasaran Kerja yang didukung oleh 21 Indikator Kinerja Utama. Sebagaimana yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS		Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	
				Tahun 2024	Triwulan I	Persentase (%)
1	Pengelolaan kenelayanan maju dan bersaing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	40	5,56	13,9
		2	Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan (persen)	72	66,22	91,97
		3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju (lokasi)	65	-	-
		4	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	10.000	361	3,61
		5	Persentase nelayan yang terlindungi	100	103,3	103,3
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	6	Alokasi perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sector pengangkutan ikan (Alokasi kapal)	12.000	3901	32,51
		7	Dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan (dokumen)	9.000	4.380	48,67

		8	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	90	-	-
		9	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (skala/nilai)	3	-	-
		10	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	95	100	95
		11	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	100	97,05	97,05
		12	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	90	91,9	102,11
3	Korporasi nelayan yang dikembangkan	13	Kelompok nelayanyang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan (jumlah kelompok)	10	-	-
4	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK	14	Tenaga kerja yang terlibat pada penge;lolaan perizinan dan kenelayanan (orang)	238.400	--	-
5	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayana	15	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	85	-	-
		16	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	94	-	-
		17	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	133,33	141,84

		18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanna (persen)	80	95	118,75
		19	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	80	-	-
		20	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	98	-	-
		21	Nilai survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	88,3	88.97	100,76

Bab 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Presiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan Peradaban Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipungungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan lestari. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (control) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Selain perubahan terhadap fokus kenelayanan dan pengendalian penangkapan ikan, juga terdapat perubahan terkait dengan alokasi anggaran dimana pada periode pemerintahan sebelumnya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengalokasikan sebagian besar anggarannya pada pembangunan pelabuhan perikanan, namun pada periode pemerintahan saat ini difokuskan kepada pengadaan kapal perikanan. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan pembangunan perikanan tangkap kepada nelayan sehingga nelayan secara langsung dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan perikanan tangkap. Di sisi lain, fokus pelabuhan perikanan adalah upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan tetap menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2024, melakukan penyusunan Laporan Kinerja setiap triwulan dengan menggunakan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada RPJMN 2020 – 2024 dan RKP tahun 2024. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan secara bertahap dari triwulan I sampai dengan triwulan IV dan akan dilanjutkan dengan menyusun Laporan kinerja (LKj) tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap selama periode tahun 2024.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perizinan dan Kenelayanan triwulan I tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Perizinan dan Kenelayanan triwulan I tahun 2024 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian dirumuskan suatu simpulan atau rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi .

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

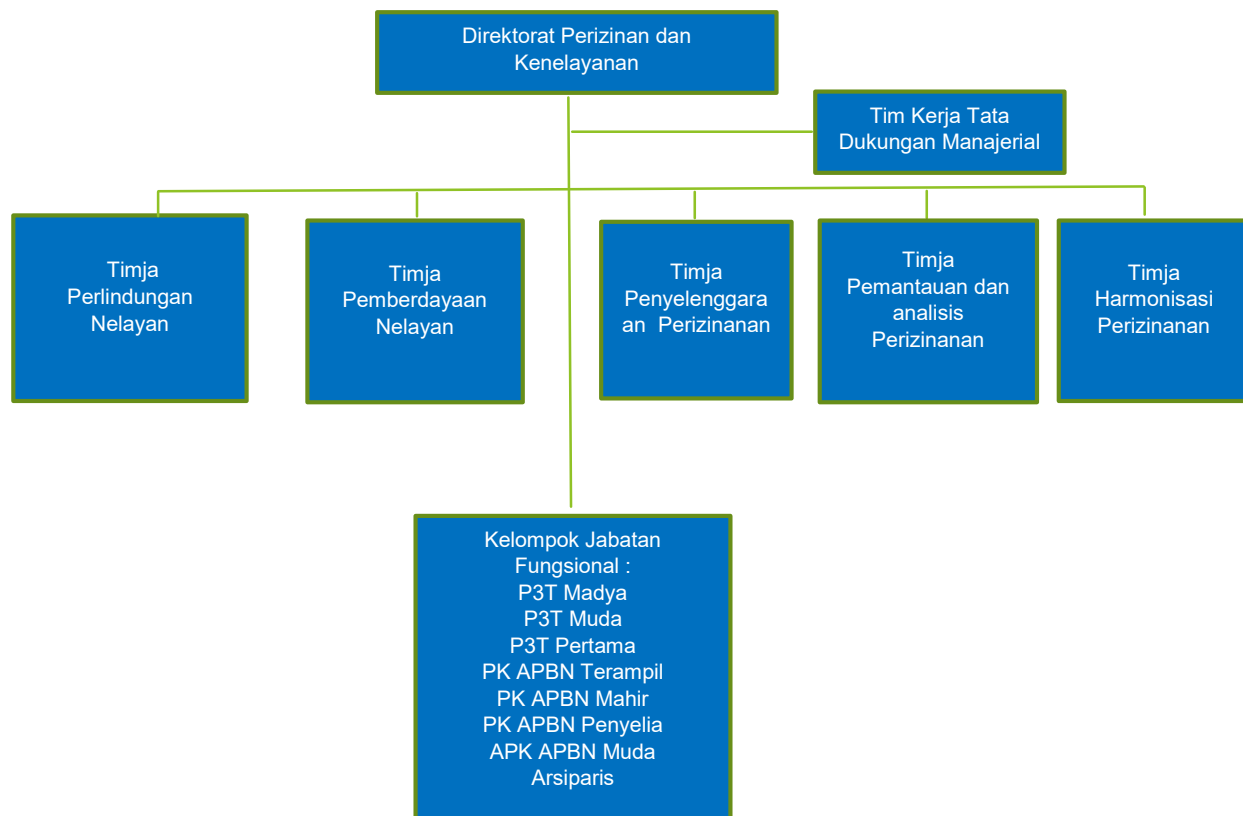
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2023, Direktorat Perizinan dan

Kenelayanan yang dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan kenelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menyelenggarakan fungsi yakni:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang tata perizinan harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang tata perizinan harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tata perizinan, harmonisasi dan pemantauan perizinan, kelembagaan dan perlindungan nelayan, serta usaha nelayan;
6. Pelaksanaan urusa tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

Adapun susunan organisasi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan terdiri atas:

- a. **Tim Kerja Perlindungan Nelayan**, yang terdiri atas Sub Pokja Kelembagaan Usaha Nelayan dan SubPokja Pengembangan Usaha Nelayan,
- b. **Tim Kerja Pemberdayaan Nelayan**, terdiri atas SubPokja Perlindungan Nelayan dan SubPokja Pemberdayaan Nelayan,
- c. **Tim Kerja Penyelenggaraan Perizinan**, yang terdiri atas SubPokja Perizinan Usaha Perikanan dan SubPokja Perizinan Kapal Perikanan
- d. **Tim Kerja Pemantauan dan Analisis Perizinan** yang terdiri atas SubPokja Pemantauan Perizinan dan SubPokja Analisis Perizinan,
- e. **Tim Kerja Harmonisasi Perizinan** yang terdiri atas SubPokja Sistem Informasi dan Pertukaran Data Perizinan dan SubPokja Integrasi Perizinan Pusat dan Daerah
- f. **Timja Kerja Dukungan Manajerial**; dan
- g. **Kelompok Jabatan Fungsional :**
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Madya
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Muda
 - Kelompok Jabatan Fungsional P3T Pertama
 - Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Terampil
 - Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Mahir
 - Kelompok Jabatan Fungsional PK APBN Penyelia
 - Kelompok Jabatan Fungsional APK APBN Muda
 - Kelompok Jabatan Fungsional Arsiparis



Gambar 1. Bagan Struktur organisasi Dit. PDK

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pertriwulan selama satu tahun berjalan. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan triwulanan sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari lampiran merupakan kumpulan dari penetapan kinerja, pengukuran kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur Perizinan dan Kenelayanan dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Bab 2. PERENCANAAN KINERJA

1.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memiliki peran strategis untuk mendukung fokus program utama presiden tersebut di bidang perikanan tangkap yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan dengan berbagai upaya akselerasi pencapaian. Diharapkan pembangunan perikanan tangkap pada gilirannya mampu meningkatkan kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi pembangunan perikanan tangkap ditetapkan sebagai berikut: “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”. Visi tersebut merupakan prinsip utama yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam misi, strategi dan upaya- upaya pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Misi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya ikan melalui perizinan;
2. Penertiban dan peningkatan keberlanjutan usaha perikanan tangkap melalui perizinan

Moto dan maklumat pelayanan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Dalam melaksanakan fungsinya, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memiliki MOTO ‘**Cepat Efektif Pasti Efisiensi dan Transparansi**’. Adapun **Maklumat** pelayanan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sbb :

Seluruh unsur pimpinan dan staf Direktorat Perizinan dan Kenelayanan akan melakukan upaya – upaya pelayanan kepada masyarakat secara transparan, akurat dan akuntabel ;

1. Melaksanakan standar pelayanan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah dan terjangkau serta tidak ada diskriminasi.

3. Menolak dan tidak menerima pemberian apapun yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik.
4. Menerima kritik dan pengaduan masyarakat serta secepatnya mengambil tindakan untuk memberikan solusinya.
5. Menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila tidak melaksanakan standar pelayanan yang ada.

2.2 SASARAN, INDIKATOR, TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan capaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJMN DJPT 2020 – 2025, pada tabel berikut adalah target kinerja dan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayan Tahun 2024.

Tabel 1. Rencana Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE				
1	Pengelolaan kenelayan maju dan berdaya saing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	40
		2	Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan (persen)	72
		3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju (lokasi)	65
		4	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	10.000
		5	Persentase nelayan yang terlindungi (persen)	100
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	6	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sector pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000
		7	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	9.000
		8	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	90
		9	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor pengangkutan ikan dan pengangkutan ikan (skala/nilai)	3
		10	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	95

		11	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100
		12	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	90
3	Korporasi nelayan yang dikembangkan	13	Kelompok nelayan yang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan (jumlah kelompok)	10
4	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK	14	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (orang)	238.400
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE				
5	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	15	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	85
		16	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	94
		17	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94
		18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	80
		19	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	80
		20	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	98
		21	Nilai survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	88,3

Pada Tahun 2024 anggaran pembangunan perikanan tangkap melalui program pengelolaan perikanan tangkap telah melalui beberapa revisi. Revisi terakhir adalah sebesar Rp. 178.023.975.000,- Triliun dengan rincian untuk masing masing kegiatan adalah sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2024

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp.000)
1	Izin berusaha sub sektor penangkapan / pengangkutan ikan yang diterbitkan	1.750.000
2	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	1.500.000
3	Nelayan yang difasilitasi perlindungannya	27.500.000
4	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	2.000.000
5	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	5.000.000
6	Nelayan yang yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	2.076.000

7	Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	1.600.000
8	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang meningkat kapasitas kelembagaannya (MP Korporasi)	2.000.000
9	Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Koperasi)	10.000.000
10	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	104.900.000
11	Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	2.500.000
12	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	8.250.000
TOTAL		178.023.975

2.3 RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA

Rencana aksi penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen penetapan kinerja. Dokumen rencana aksi digunakan sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan *learning and growth* sebagaimana pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

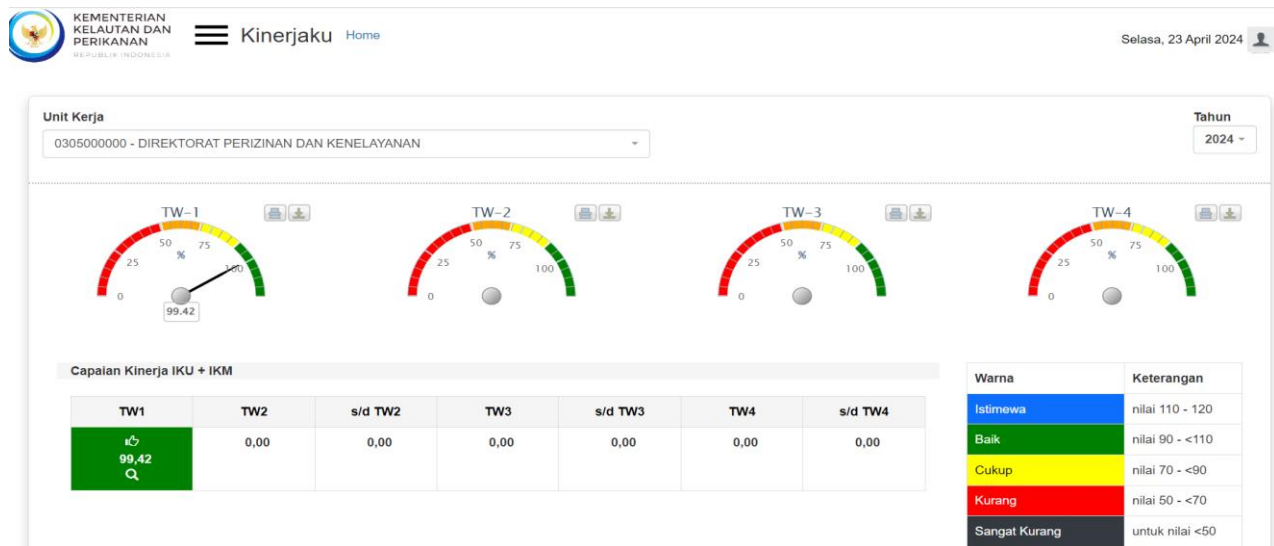
NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
1	Persentase Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing	1 Penyusunan / reuiu juknis kelembagaan nelayan
		2 Sosialisasi dan identifikasi peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan (KUB dan Korporasi nelayan)
		3 Supervisi dan evaluasi penguatan kelembagaan nelayan (KUB dan Korporasi)
		4 Penyusunan juknis kampung nelayan maju
		5 Sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan kampung nelayan maju
		6 Pendataan identitas nelayan
		7 Koordinasi dan pelaporan hasil identifikasi identitas nelayan dalam rangka perlindungan

NO	INDIKATOR KINERJA	RENCANA AKSI
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan/reviu pedoman pengelolaan perizinan pusat dan daerah 2. Implementasi integrasi system perizinan pusat dan daerah 3. Analisis laporan kegiatan usaha (LKU) dan laporan kegiatan penangkapan (LKP)
3	Jumlah Korporasi nelayan yang dikembangkan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pendampingan pengembangan korporasi nelayan 2 Reviu dan sosialisasi bantuan pengembangan prasarana kelompok nelayan dalam rangka pembentukan korporasi nelayan 3 Pelaksanaan bantuan pengembangan prasarana kelompok nelayan dalam rangka pembentukan korporasi nelayan 4 Supervisi dan evaluasi bantuan pengembangan prasarana kelompok nelayan dalam rangka pembentukan korporasi nelayan
4	Jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (PDK)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pendataan jumlah tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan perizinan dan kenelayanan
5	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan kompetensi pegawai melalui seminar, bimbingan teknis dan pelatihan – pelatihan , Memberikan kesempatan kepada pegawai lingkup Dit. PDK untuk mengikuti program tugas ataupun ijin belajar. 2 Melakukan monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen SAKIP 3 Memanfaatkan media social dalam penyampaian informasi dan komunikasi terkait kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Dit. PDK Berpartisipasi Aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan 4 Melaksanakan tindak lanjut dari setiap hasil temuan pengawasan 5 Melaksanakan monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan 6 Mempercepat pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan penyerapan anggaran 7 Meningkatkan dan melakukan perbaikan layanan di setiap unit kerja layanan

Bab 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Di dalam perjanjian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pasca validasi tim kerja , terdapat 5 (Lima) sasaran kegiatan dan 21 (Duapuluh satu) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian kegiatan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan perjanjian kinerja di atas, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Tahun 2023 seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard capaian Aplikasi Kinerjaku

Dari dashboard Kinerjaku dapat dilihat capaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memperoleh nilai sebesar 99,42%. Capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 pada periode yang sama yang memperoleh capaian sebesar 76,27%. Pada Tahun 2024 , Direktorat Perizinan dan Kenelayanan memiliki 5 Sasaran kegiatan dan 21 Indikator Kinerja. Capaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pada periode Triwulan I Tahun 2024 sudah sangat baik. Hal ini bisa kita lihat dari pencapaian indikator kinerja yang ada pada aplikasi kinerjaku yang memperlihatkan indikator berwarna hijau, yang berarti baik.

Tabel 4. Capaian Sasaran Strategis (SK) Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Triwulan I, Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	CAPAIAN 2024		
				Triwulan I	% thd Target	
INTERNAL PROCESS PERSPEKTIVE						
1	Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	40	5,56	13,9
		2	Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan (persen)	72	66,22	91,97
		3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju (lokasi)	65	-	-
		4	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	10.000	361	3,61
		5	Persentase nelayan yang terlindungi	100	103,3	103,3
2	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	6	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal)	12.000	3901	32,51
		7	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	9.000	4380	48,67
		8	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti (persen)	90	-	-
		9	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3	-	-
		10	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	95	97,05	102,16
		11	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	100	100	100
		12	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	90	91,9	102,11
3	Korporasi nelayan yang dikembangkan	13	Kelompok nelayan yang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan (jumlah kelompok)	10	-	-
4	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK	14	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan (orang)	238.400	-	-
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE						
5	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	15	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayan (Indeks)	85	-	-
		16	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (nilai)	94	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	CAPAIAN 2024	
				Triwulan I	% thd Target
		17 Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	133,33	141,84
		18 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	80	95	118,75
		19 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	80	-	-
		20 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (persen)	98	-	-
		21 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (indeks)	88,3	88,97	100,76

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut :

3.2.1 Pengelolaan kenelayanan maju dan berdaya saing

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 5 (Lima) indikator yakni (1) Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya, (2) Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan, (3) Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju, (4) Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan, (5) Persentase nelayan yang terlindungi

1. Persentase Kelompok Usaha bersama yang meningkat kapasitasnya

Persentase Kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitasnya adalah kelompok usaha bersama yang diharapkan dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui fasilitasi (1) Akses pendanaan dari lembaga keuangan, (2) Kegiatan pembinaan kelembagaan (KUB) bimbingan teknis administrative, manajerial, sumber daya manusia dll (3) Kegiatan pembinaan usaha KUB (Bimbingan teknis usaha penangkapan ikan, bantuan sarana usaha, bimbingan teknis diversifikasi usaha, dll). Adapun jumlah KUB yang ditargetkan akan mendapatkan fasilitasi kegiatan akses pendanaan tahun 2024 sebanyak 150 KUB. Capaian KUB yang telah mendapatkan fasilitasi akses pendanaan sebanyak 152 KUB. Atau sebesar 101,33% dari target. Jumlah KUB yang ditargetkan mendapatkan fasilitasi kegiatan pembinaan kelembagaan sebanyak 400 KUB. Capaian KUB yang telah mendapatkan fasilitasi pembinaan kelembagaan sebanyak 402

KUB atau sebesar 100,5% dari target. Jumlah KUB yang ditargetkan mendapatkan fasilitasi kegiatan pembinaan usaha sebanyak 150 KUB. Capaian KUB yang telah mendapat fasilitasi pembinaan usaha sebanyak 153 KUB atau sebesar 102% dari target. Adapun capaian persentase KUB yang meningkat kapasitasnya adalah sebesar 5,56% atau sebesar 55,6% dari target triwulan satu atau 13,9% dari target tahunan..

Tabel. 5 Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I	%
Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya (persen)	40	10	5,56	13,9

Adapun capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian IKU beberapa tahun sebelumnya karena IKU ini merupakan IKU baru. Meskipun demikian kegiatan peningkatan KUB merupakan kegiatan yang sudah rutin dilakukan, namun tidak masuk dalam indikator kinerja utama (IKU) pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.

2. Persentase Nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan.

Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan adalah peningkatan jumlah nelayan yang terdaftar dalam system pendataan nelayan pada aplikasi satu data KKP hingga dikeluarkannya nomor register kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) dibidang penangkapan ikan. Aplikasi satu data KKP dapat diakses pada laman <https://statistik.kkp.go.id/kusuka-new/dashboard.php>.

Tabel. 6 Persentase nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I	%
Persentase Nelayan yang memiliki kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan	72	18	66,22	91,97

Adapun capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelum karena IKU ini merupakan IKU baru.

3. Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju .

Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju adalah kampung nelayan yang dibangun atau diperbaiki fasilitas umum dan fasilitas usahanya melalui kegiatan yang berasal dari pendanaan oleh instansi pemerintah, BUMN, Swasta atau swadaya masyarakat. Tujuan dari penataan kampung nelayan maju (kalaju) adalah adalah terciptanya kawasan/lingkungan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya nelayan. Sampai saat ini telah ditetapkan 16 calon lokasi tahap I melalui Kepmen KP No.32 Tahun 2024 tentang calon lokasi kampung nelayan maju tahap I tahun 2024. Adapun calon lokasi yang sudah ditetapkan berdasarkan Kepmen KP No.32 Tahun 2024 adalah (1) Kampung Batang Tindih, Desa Nagari Pulau Rajo Inderapiura ,Kec. Air Pura, Sumatera Barat, (2) Kampung Pantai Harapan, Ogan Hilir, Sumatera Selatan, (3) Kuala Teladas Tulang Bawang, Lampung, (4) Pusaka Jaya Karawang, Jawa Barat, (5) Sinar laut Cianjur, Jawa Barat, (6) Cipeundeuy Surade Sukabumi, Jawa Barat, (7) Paoman Indramayu, Jawa Barat, (8) Cilamaya Girang Subang, Jawa Barat, (9) Rowo Kebumen, Jawa Tengah, (10) Tumpak kepuh Blitar, Jawa Timur, (11) Nglebeng Trenggalek, Jawa Timur, (12) Waiwuring Witihama Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, (13) Labuangrano Tapalang Barat, Sulawesi Barat, (14) Borimasunggu Maros, Sulawesi Selatan, (15) Tupabiring Bontoa Maros, Sulawesi Selatan, (16) Holimombo Jaya Pasar Wajo Buton, Sulawesi Tenggara. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti rapat pembahasan rencana RAB DED dan rencana penandatanganan kontrak yang akan dilaksanakan pada bulan Mei. Verifikasi sisa lokasi yang sudah ditargetkan dengan calon lokasi yang telah ditetapkan melalui Kepmen KP. Dimana lokasi yang ditargetkan pada Tahun 2024 sebanyak 65 lokasi dan sudah ditetapkan sebanyak 16 lokasi. Pelaporan capaian IKU ini baru bisa dilaporkan pada akhir tahun karena periode pelaporan IKU ini dilakukan secara tahunan.

Tabel. 7 Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I	%
Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penataannya melalui program kampung nelayan maju	65	-	-	-

4. Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan .

Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan adalah nelayan yang memiliki tanah baik lahan hunian maupun lahan kosong/produktif untuk ditingkatkan status kepemilikannya menjadi bersertifikat sesuai dengan ketentuan. Kegiatan sertifikasi Hak atas Tanah (SeHAT) Nelayan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah nelayan dan pelaku usaha penangkapan ikan, mengubah predikat modal pasif (*liquid capital*) menjadi modal aktif (*active capital*) yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit lembaga keuangan (bank dan non bank). Adapun kegiatan dilakukan berupa sosialisasi pra dan pasca SeHAT nelayan, identifikasi lapang dan pendampingan. Target tahun 2024 sebanyak 10.000 CPCL. Sampai saat ini baru tercapai sebanyak 361 CPCL atau sebesar 3,61% dari target tahunan yang telah ditetapkan. adapun capaian ini diperoleh dari Kab. Tulungagung Jawa Timur sebanyak 183 CPCL, Kabupaten Sumenep sebanyak 178 CPCL jadi total capaian secara keseluruhan adalah 361 CPCL.

Tabel. 8 Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan

Satuan : Lokasi

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I	%
Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan	10.000	2.500	361	3,61

Table 9 Perbandingan Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan.

SK 1 Pengelolaan Kenelayanan Maju dan Berdaya saing											
IKU 4 Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan											
Realisasi TW I 2019-2024					Realisasi 2024					Renstra DJPT	
TW I 2019	TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	Target Thn. 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Realisasi thd target TW I Thn 2024	Realisasi thd target Thn. 2024	Target Renstra 2024	% capaian TW I thd target akhir Renstra
-	-	550	293	-	10000	2500	361	14,44	3,61	100	361

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa capaian kegiatan ini pada triwulan I mengalami penurunan di tahun – tahun pada periode yang sama. sebelumnya IKU ini tidak masuk dalam indikator kinerja utama Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, akan tetapi kegiatan IKU ini menjadi bagian pembentuk indikator kinerja utama (IKU) direktorat. Sehingga capaiannya masih bisa dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya seperti yang dapat kita lihat pada tabel.

5. Persentase nelayan yang terlindungi .

Persentase nelayan yang terlindungi adalah nelayan yang terlindungi dalam kegiatan penangkapan ikan baik terhadap resiko usaha maupun resiko keselamatan. Fasilitas yang dilakukan dapat berupa penyediaan logistic perbekalan melaut maupun fasilitas asuransi nelayan mandiri. Tujuan fasilitas asuransi nelayan mandiri adalah untuk menjembatani mitra asuransi untuk dapat menyampaikan informasi terkait produk asuransi nelayan yang dimiliki kepada nelayan. Selain itu fasilitas asuransi nelayan mandiri juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran nelayan untuk dapat berasuransi secara mandiri, mengingat nelayan merupakan profesi yang rentan terhadap resiko kecelakaan. Jumlah nelayan yang ditargetkan mendapat fasilitas kegiatan asuransi nelayan mandiri tahun 2024 adalah sebanyak 1.800 orang. Dengan capaian sebanyak 3.659 orang atau sebesar 203,27% dari target tahunan yang sudah ditetapkan. Dimana capaian asuransi nelayan mandiri ini diperoleh dari kabupaten Indramayu 2.341, Trenggalek 1318 . Jumlah nelayan yang mendapatkan fasilitas penyediaan logistic perbekalan melaut sebanyak 54.000 orang dari target 30.000 orang. Adapun capaian IKU ini sampai dengan TW I adalah 103,3%. Capaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama karena satuan penghitungan menggunakan persentase yang diperoleh dari beberapa komponen nilai tidak seperti tahun sebelumnya yang satuan penghitungannya menggunakan satuan orang langsung.

Tabel. 10 Persentase nelayan yang terlindungi

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I	%
Persentase nelayan yang terlindungi	100	25	103,3	103,3

3.2.2 Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 7 (Tujuh) indikator yakni (1) Alokasi perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (alokasi kapal), (2) Dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan, (3) Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti, (4) Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (5) Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (6) Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan, (7) Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur. Adapun capaian indikator dapat kita pantau langsung dari aplikasi perizinan yaitu aplikasi SIMKADA dan aplikasi SILAT. *Permasalahan* yang terjadi saat ini

adalah updating system aplikasi yang menyesuaikan perkembangan kebijakan terbaru seringkali menjadi kendala bagi para stakeholder dalam penggunaannya sehingga masih memerlukan pendampingan dan bimbingan secara teknis. Dan yang terbaru saat ini adalah adanya aplikasi E-PIT yang merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya. Dimana aplikasi ini menitik beratkan pada penangkapan ikan terukur. Sampai saat ini aplikasi ini juga masih terus dilakukan sosialisasi.

1. Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan.

Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan adalah alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, yang diterbitkan dalam surat izin usaha perikanan (SIUP) melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi. Adapun keberhasilan pencapaian IKU ini disebabkan oleh kecepatan dan penyederhanaan prosedur perizinan yang memungkinkan pelaku usaha dapat memperoleh izin dalam waktu yang singkat, tanpa melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. Disisi lain capaian ini juga tidak lepas dari hal – hal yang menghambat proses pencapaian. Diantaranya pemahaman yang kurang terhadap regulasi perizinan usaha perikanan. Dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme alur proses perizinan berbasis aplikasi OSS RBA – SILAT. Pada tahun sebelumnya IKU ini bukan merupakan indikator utama dalam penghitungan capaian kinerja namun menjadi salah satu komponen dari penghitungan IKU yang ada di Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yaitu IKU persentase perizinan sesuai ketentuan dimana IKU dihitung dari jumlah alokasi , realisasi dan jumlah provinsi. Akan tetapi pada akhir tahun 2023 (triwulan IV) terdapat perubahan dimana capaian yang dihitung tidak lagi berupa persentase. Capaian dihitung dari jumlah alokasi perizinan yang terbit saja. Dengan demikian perbandingan IKU ini belum dapat dilakukan dengan tahun sebelumnya.

Tabel. 11 Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan

Satuan : alokasi kapal

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I	%
Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan	12.000	3.000	3.901	32,51

2. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan .

Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (SIKPI), serta sertifikat kuota penangkapan ikan (SKTI) adalah dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan (SIPI) dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan (SIKPI), serta sertifikat kuota penangkapan ikan (SKTI) yang diterbitkan melalui proses verifikasi, klarifikasi, penelaahan dan evaluasi . Hampir sama dengan IKU sebelumnya (Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan). Keberhasilan pencapaian IKU ini disebabkan oleh kecepatan dan penyederhanaan prosedur perizinan yang memungkinkan pelaku usaha dapat memperoleh izin dalam waktu yang singkat, tanpa melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. Disisi lain capaian ini juga tidak lepas dari hal – hal yang menghambat proses pencapaian. Diantaranya pemahaman yang kurang terhadap regulasi perizinan usaha perikanan. Dimana masih banyak pelaku usaha yang belum memahami mekanisme alur proses perizinan berbasis aplikasi OSS RBA – SILAT. Pada tahun sebelumnya IKU ini juga bukan merupakan indikator utama dalam penghitungan capaian kinerja namun menjadi salah satu komponen dari penghitungan IKU yang ada di Direktorat Perizinan dan Kenelayan yaitu IKU persentase perizinan sesuai ketentuan dimana IKU dihitung dari jumlah alokasi , realisasi dan jumlah provinsi. Akan tetapi pada akhir tahun 2023 (triwulan IV) terdapat perubahan dimana capaian yang dihitung tidak lagi berupa persentase. Capaian dihitung dari jumlah dokumen perizinan yang terbit saja (realisasi kapal). Dengan demikian perbandingan IKU ini belum dapat dilakukan dengan tahun sebelumnya.

Tabel. 12 Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan

Satuan : dokumen

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I	%
Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan	9.000	2.250	4.380	48,67

3. Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti .

Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti adalah jumlah rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang sudah ditindaklanjuti. Rekomendasi hasil analisis perizinan yang ditindaklanjuti berupa permohonan suspend kapal. IKU Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti merupakan IKU baru yang ada pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dimana IKU ini belum ada di tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Periode pelaporan IKU ini juga dilakukan secara semesteran sehingga capaian pada periode triwulan I belum dapat dilaporkan.

Tabel.13 Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti

Satuan : dokumen

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I	%
Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	90	-	-	-

4. Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.

Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah tingkat kepatuhan seluruh pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan berdasarkan hasil analisis profil resiko. Analisis profil resiko diterapkan kepada setiap pelaku usaha melalui penilaian terhadap :

- Jumlah billing terbit, tidak dilunasi melebihi tanggal jatuh tempo sejak tanggal kedatangan kapal
- Nilai laporan perhitungan mandiri (LPM), dibawah rata – rata
- Kepatuhan aturan logbook kapal penangkapan ikan

Melalui tabulasi dan perhitungan terhadap kondisi dan pembobotan akan ditentukan profil resiko sbb :

- Nilai total < 25 = Resiko Rendah
- Nilai total 20 – 50 = Resiko Sedang
- Nilai total >50 = Resiko Tinggi

Dari penilaian profil resiko tersebut selanjutnya ditentukan indeks kepatuhan untuk seluruh pelaku usaha di seluruh Indonesia (Izin pusat) dengan menghitung persentase seluruh pelaku usaha beresiko rendah berdasarkan ketentuan :

Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan. Persentase pelaku usaha dengan profil resiko rendah terhadap seluruh pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

- < 40%
- 40% - 50 %
- 51% - 60%
- 61% - 70%
- 71% - 80%
- 81% - 90%
- >90%

Tabel.14 Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

Satuan : skala/nilai

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I	%
Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	3	-	-	-

Seperti halnya dengan IKU sebelumnya, IKU Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan merupakan IKU baru yang ada pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dimana IKU ini belum ada di tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Periode pelaporan IKU ini juga dilakukan secara tahunan sehingga pencapaian IKU pada periode triwulan I belum dapat dilaporkan.

5. Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan pengangkutan ikan .

Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah penilaian ketersediaan layanan aplikasi perizinan berdasarkan log aplikasi. Dimana jumlah hari ketersediaan layanan dihitung dari hari dengan waktu ketersediaan waktu layanan 24 jam penuh dengan melihat log rekaman aktivitas aplikasi. Adapun capaian IKU Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah 100% atau sebesar 105,26 dari target. Keberhasilan pencapaian IKU ini tidak lepas dari pengembangan aplikasi yang terus dilakukan

agar lebih ringan dan mudah diakses. Tidak hanya itu, menyiapkan aplikasi yang eco friendly mudah digunakan dan alur prosesnya jelas serta melakukan maintenance secara berkala. Selain itu factor keberhasilan dari luar juga mempengaruhi seperti koordinasi dengan BKPM dan kemenkeu berjalan lancar. Menyiapkan jaringan internet pada lokasi sentra nelayan dan pelanuhan perikanan. Selain factor keberhasilan pencapaian, IKU ini juga tidak lepas dari factor factor yang dapat menghambat pencapaian seperti, Jaringan internet, ketersediaan aplikasi membutuhkan koneksi internet yang stabil dan bandwidth yang memadai, apabila tidak ada koneksi internet atau badwidth yang tidak mencukupi maka aplikasi tidak dapat berjalan lancar; Ketersediaan Integrasi data, saat ini aplikasi yang ada terintegrasi dengan Aplikasi OSS-RBA dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mendapatkan Nomor Ijin Berusaha (NIB) dan Aplikasi Simponi dari Kementerian Keuangan, apabila salah satu atau kedua aplikasi ini bermasalah tentu akan menghambat aplikasi layana perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan;

Tabel.15 Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha sub sector penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I	%
Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	95	23,75	100	105,26

IKU Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan juga merupakan IKU baru yang ada pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dimana IKU ini belum ada di tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama.

6. Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan .

Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan adalah penyelenggaraan konsultasi dan penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan melalui saluran yang ditentukan (WA Center). Pengaduan terkait perizinan yang masuk melalui WA center atau melalui CM Bitrix yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dan diselesaikan. IKU Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan juga merupakan IKU baru yang ada pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dimana IKU ini belum ada di tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Tabel.16 Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I	%
Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	100	25	97,05	97,05

7. Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur.

Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur adalah provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan c,q Ditjen Perikanan Tangkap .

Tabel.17 Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I	%
Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur	90	22,5	91,9	102,11

IKU Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan gubernur merupakan IKU baru yang ada pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Dimana IKU ini belum ada di tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian capaian IKU ini belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3.2.3 Korporasi nelayan yang dikembangkan

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni (1) Kelompok nelayan yang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan . Korporasi nelayan yang dikembangkan adalah kelompok nelayan atau KUB yang bergabung dalam suatu badan usaha berbadan hukum koperasi untuk menyelenggarakan usaha dalam kerangka model korporasi nelayan melalui tahapan (1) pengembangan kelembagaan dan model bisnis, (2) penguatan sarana usaha dan kualitas SDM. Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 45 Tahun

2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan :” Koperasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi nelayan merupakan kelembagaan usaha nelayan yang dikembangkan sebagai korprasi nelayan yang berbadan hukum. Tujuan korporasi adalah untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan nelayan. Adapun sasaran bantuan pengembangan kelembagaan nelayan berbasis korporasi nelayan yaitu keperasi dan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Adapun indikator keberhasilannya adalah (1) tersalurkannya bantuan pengembangan kelembagaan nelayan berbasis korporasi nelayan dengan tepat sasaran (2) Termanfaatkannya bantuan pengembangan kelembagaan nelayan berbasis korporasi nelayan oleh penerima bantuan.

Adapun jenis kegiatan pengembangan kelembagaan nelayan berbasis korporasi berupa pemberian bantuan sarana dalam bentuk barang dengan spesifikasi bantuan meliputi sarana penunjang usaha perikanan, peralatan dan mesin penunjang usaha perikanan, peralatan perkantoran, dan alat pengolah data. Sampai saat ini kegiatan korporasi belum diperoleh lokasi penetapan korporasi. Kegiatan yang sedang berjalan saat ini berupa pendampingan terkait pemasaran seperti pencetakan kartu membership, menyusun program membership, mencetak kupon diskon, menyiapkan admin akun medsos , membangun jaringan/relasi/follower dan menyiapkan konten promosi. Adapun penyampaian capaian IKU ini baru dapat dilakukan pada akhir tahun, mengingat periode pelaporan IKU ini dilakukan secara tahunan.

3.2.4 Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator yakni (1) Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan. Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK adalah jumlah tenaga kerja yang terlbat dalam seluruh kegiatan yang terkait dalam pengelolaan perizinan dan kenelayanan. Perghitungan indikator ini dilakukan dengan menghitung semua jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam seluruh kegiatan terkait pengelolaan perizinan dan kenelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tenaga kerja yang dimaksud adalah petugas KKMB dan pojok pendanaan, petugas identifikasi CPCL SEHAT nelayan, instruktur/trainer dan petugas pendamping pada kegiatan diversifikasi usaha, tenaga kerja pada lembaga keuangan, petugas dan penyuluh perikanan pendamping BPAN, anggota KUB yang terlibat dalam penguatan kelembagaan, tenaga kerja persiapan kampung nelayan maju, tenaga kerja yang terlibat pada persiapan korporasi, pelaku usaha perorangan pengguna aplikasi SILAT dan SIMKADA, serta operator SIMKADA. Adapun jumlah tenaga kerja secara keseluruhan belum dapat dilaporkan mengingat periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

Tabel. 18 Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK

Satuan : orang

Nama IKU	Target Tahun 2024	Capaian Triwulan I	%
Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK.	238.400	-	-

3.2.5 Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui 7 (Tujuh) indikator yakni (1) Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan (2) Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat perizinan dan kenelayanan (3) Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan system pengetahuan yang terstandar (4) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat perizinan dan kenelayanan (5) Tingkat evektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat perizinan dan kenelayanan (6) Persentase penyerapan anggaran Direktorat perizinan dan keneayanan, (7) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

1. Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Indikator ini merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 tahun 2018). Nilai indeks professionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun.

Dalam penilaian indeks profesionalitas ASN dibagi menjadi 4 komponen sebagai berikut:

- (1) **Kualifikasi.** Berupa peningkatam kualifikasi melalui tugas dan izin belajar .
- (2) **Kompetensi.** Penghitungan Nilai komptensi dikelompokkan menjadi 3 bagian sebagai berikut : (a) Pejabat Struktural dihitung dengan kompenen yaitu DIKLATPIM, DIKLAT 20JP, SEMINAR (b) Pejabat fungsional dihitung melalui 3 komponen yaitu DIKLAT TEKHNIS/FUNGSIONAL, DIKLAT 20JP dan SEMINAR (c) Pejabat fungsional umum/staf dihitung dengan komponen DIKLAT 20 JP dan SEMINAR.
- (3) **Kinerja.** Berupa nilai SKP Pegawai
- (4) **Hukuman Disiplin,** berupa persentase jumlah penyelesaian kasus – kasus kepegawaian disbanding kasus – kasus yang dilaporkan.

Periode pelaporan IKU ini dilakukan secara semesteran sehingga capaian pada periode triwulan I belum dapat dilakukan.

Tabel. 19 Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan
Satuan : indeks

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I 2024	%
Indeks Profesionalitas (IP) ASN Lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan	85	85	-	-

2. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

SAKIP pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan (perencanaan strategik, perencanaan kerja). Adapun tujuan rekonsiliasi itu sendiri adalah (1) meningkatkan aspek pelaporan kinerja SAKIP, (2) meningkatkan konsistensi penerapan sistem manajemen kinerja pada SAKIP, (3) memberikan umpan balik pada perbaikan proses perencanaan kinerja. Output rekonsiliasi menggambarkan nilai kepatuhan, kesesuaian dan ketercapaian serta ketepatan masing masing unit kerja. Adapun **capaian** nilai rekonsiliasi kinerja Dit. Perizinan dan Kenelayanan pada triwulan I belum dapat dilaporkan karena periode pelaporan dilakukan secara tahunan.

Tabel 20. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Satuan : nilai

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I 2024	%
Nilai Rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	94	-	-	-

Sistem Manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penerapan manajemen pengetahuan lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan dilakukan melalui 3 komponen yakni : (1) Tingkat pemenuhan dokumen kinerja (2) Tingkat keikutsertaan pejabat dan staf dalam aplikasi Bitrix24 KKP dan (3) Tingkat keaktifan unit kerja dalam aplikasi Bitrix24 KKP. Adapun capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 133,33 atau sebesar 144,92% dari target tahunan.

Tabel 21. Persentase Unit Dit.Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian Triwulan I	%
Persentase unit Dir. Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	94	94	133,33	141,84

4. Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan IV Tahun 2024. Dari hasil penilaian rekomendasi pengawasan terdapat beberpa 20 temuan yang menjadi objek pengawasan yakni pelaksanaan kegiatan kalaju dan korporasi pada Dit. PDK tahun 2023 telah ditindaklanjuti sebanyak 19 temuan. Jadi masih tersisa 1 temuan yang belum ditindaklanjuti. sehingga capaian triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 95%. Atau sebesar **81,33%** dari target tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian IKU ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya pada periode yang sama, yang hanya mencapai 11,11%.

Tabel. 22 Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian Triwulan I	%
Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	80	80	95	118,75

Tabel. 23 Perbandingan capaian rekomendasi pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.

SK 5	Tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan										
IKU 19	Tingkat epektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan										
Realisasi TW I 2019-2024					Realisasi 2024					Renstra DJPT	
TW I 2019	TW I 2020	TW I 2021	TW I 2022	TW I 2023	Target Thn. 2024	Target TW I	Realisasi TW I	Realisasi thd target TW I Thn 2024	Realisasi thd target Thn. 2024	Target Renstra 2024	% capaian TW I thd target akhir Renstra
-	-	0	100	11,11	80	20	95	475	118,75	100	95

IKU Persentase hasil rekomendasi pengawasan pada tahun 2019-2020 tidak dimasukkan dalam PK Level 2, sehingga tidak dilakukan penghitungan terhadap IKU ini.

5. Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan Merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan / efektifitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis lingkup Dit. Perizinan dan Kenelayanan. Dimana tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan

waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Adapun kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
- Memiliki anggaran yang besar
- Mendukung secara langsung target kinerja KKP
- Mendukung capaian prioritas nasional
- Merupakan arahan direktif Presiden, dan
- Pertimbangan lainnya yang relevan

Adapun capaian IKU ini belum dapat dilaporkan karena periode pelaporan dilakukan secara tahunan

Tabel. 24 Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian Triwulan I	%
Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis Dit. Perizinan dan Kenelayanan	80	80	-	-

6. Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Merupakan persentase serapan anggaran Direktorat perizinan dan kenelayanan pada periode berjalan. Penyerapan anggaran ini diukur dari jumlah realisasi pada periode berjalan dibagi dengan jumlah pagu yang ditetapkan. Meskipun angka penyerapan dapat dipantau per triwulannya, namun penghitungan nilai capaian dilakukan secara tahunan sehingga nilai capaian baru dapat dilaporkan pada akhir tahun. Permasalahan yang terjadi adalah, seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah melalui pemberlakuan skema Automatic Adjustment (AA), secara otomatis mengurangi kegiatan kegiatan yang sudah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya. Perubahan sistem rencana dan anggaran setiap tahunnya juga yang dapat mengakibatkan adanya *blokir* anggaran. Pemblokiran anggaran menyebabkan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan jadi terhambat. Hal ini tentu saja berpengaruh pada jumlah serapan anggaran periode berjalan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mengevaluasi kembali rencana aksi yang sudah dibuat sebelumnya sekaligus menyusun rencana aksi kegiatan berikutnya dengan merevisi kembali kegiatan berikut anggarannya agar bisa dipergunakan secara efektif dan efisien. Sampai dengan triwulan I Tahun 2024 persentase penyerapan anggaran mencapai 10,29% atau secara nilai anggaran sebesar Rp. 16.043.220.266,-. Meskipun demikian capaian IKU ini dilaporkan secara Tahunan.

Tabel. 25 Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan kenelayanan.

Satuan : persen

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I	%
Persentase penyerapan anggaran Direktorat perizinan dan kenelayanan	98	98	-	-

7. Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Nilai survey kepuasan masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan adalah kegiatan pengukuran secara kompherensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga didasarkan pada Permen PAN dan RB nomor 14 tahun 2017, tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

Adapun nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini diukur dari perhitungan dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun 9 unsur yang dimaksud adalah; (1) Persyaratan layanan, (2) Kemudahan prosedur, (3) Waktu penyelesaian, (4) Kesesuaian biaya, (5) Kesesuaian produk, (6) Kecepatan respon, (7) Kemudahan fitur / kemampuan petugas, (8) Kualitas isi / sarana dan (9) Layanan konsultasi. Adapun capaian dari nilai SKM Direktorat Perizinan dan Kenelayanan triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 87,38. Adapun IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru yang belum ada di tahun sebelumnya.

Tabel. 26 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan

Satuan : indeks

Nama IKU	Target Tahun 2024	Target TW I	Capaian TW I	%
Persentase penyerapan anggaran Direktorat perizinan dan kenelayanan	88,3	88,3	88,97	100,76

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat Perizinan dan Kenelayanan pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 178.023.975.000,- sesuai dengan yang tercantum pada DIPA, Nomor : SP DIPA-DIPA-032.03.1.238720/2023 tanggal 15 November 2023. Namun seiring dengan perkembangan kebijakan anggaran pemerintah, maka pada periode Triwulan I tahun 2024, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan setelah melalui revisi anggaran , memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 155.883.421.000,- triliun dengan realisasi sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 16.043.220.266,- miliar atau sebesar 10,29% dari total pagu yang dialokasikan. Adapun alokasi dan realisasi anggaran triwulan I Tahun 2024, berdasarkan jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

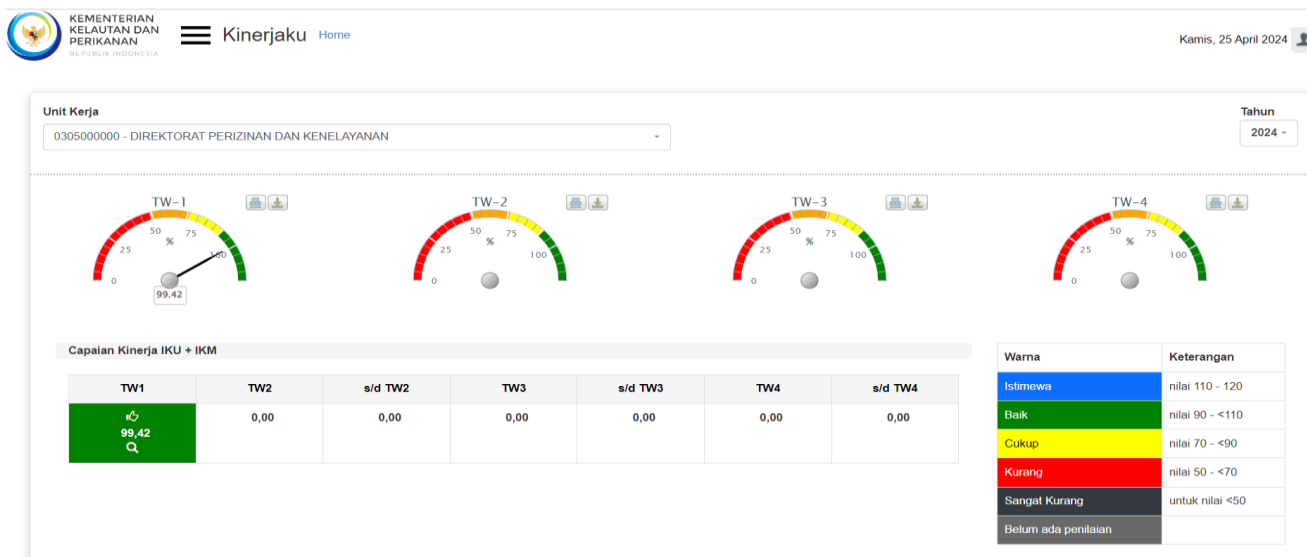
Tabel 27. Alokasi dan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024, Berdasarkan jenis kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Izin berusaha sub sektor penangkapan/pengangkutan ikan yang diterbitkan	1.250.000.000	364.120.000	29,13
2.	Nelayan yang difasilitasi perlindungannya	24.205.546.000	12.132.137.991	50,12
3.	Nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan	1.307.775.000	119.000.000	9,10
4.	Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	1.000.000.000	92.883.100	9,29
5.	Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	862.500.000	5.666.976	0,66
6.	Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	3.200.000.000	293.400.000	9,17
7.	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	2.076.000.000	243.270.000	11,72
8.	Kelompok usaha bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	1.600.000.000	217.457.628	13,59
10.	Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Meningkatkan Kapasitas Kelembagaannya (MP Korporasi)	2.000.000.000	543.930.994	27,20
11.	Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)	100.170.965.000	893.500.526	0,89
12.	Bantuan sarana pengembangan usaha nelayan (MP Korporasi)	7.000.000.000	-	-
13.	Sistem perizinan pusat - daerah yang terintegrasi	5.250.000.000	912.693.900	17,38
	TOTAL	155.883.421.000	16.043.220.266	10,29

PENUTUP

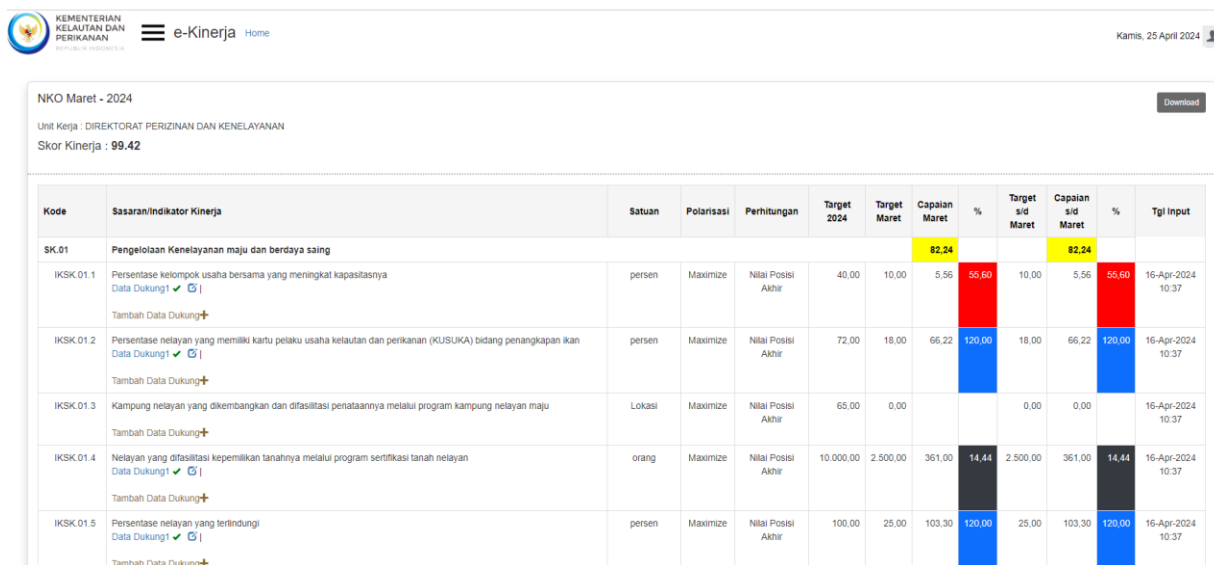
4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Triwulan I Tahun 2024 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput kedalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan KINERJAKU, diperoleh Nilai sebesar 99,42 persen sebagaimana pada Gambar berikut ini.



Gambar 3

Dashboard Aplikasi KINERJAKU Capaian Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Triwulan I Tahun 2024



Tambah Data Dukung+												
SK.02	Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan											
IKSK.02.6	Alokasi perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan Data Dukung1 ✓ Data Dukung2	alokasi kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	12.000,00	3.000,00	3.901,00	120,00	3.000,00	3.901,00	120,00	16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.02.7	Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan Data Dukung1 ✓ Data Dukung2	Dokumen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	9.000,00	2.250,00	4.380,00	120,00	2.250,00	4.380,00	120,00	16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.02.8	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang ditindaklanjuti	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.02.9	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	skala / nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	3,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.02.10	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Data Dukung1 ✓ Data Dukung2	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95,00	23,75	100,00	120,00	23,75	100,00	120,00	16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.02.11	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan Data Dukung1 ✓ Data Dukung2	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	25,00	97,05	120,00	25,00	97,05	120,00	16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.02.12	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur Data Dukung1 ✓ Data Dukung2	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	90,00	22,50	90,00	120,00	22,50	90,00	120,00	16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											

Tambah Data Dukung+												
SK.03	Korporasi nelayan yang dikembangkan											
IKSK.03.13	Kelompok nelayan yang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan Data Dukung1 ✓ Data Dukung2	Jumlah Kelompok	Maximize	Nilai Posisi Akhir	10,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											
SK.04	Tenaga Kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK											
IKSK.04.14	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan perizinan dan kenelayanan Data Dukung1 ✓ Data Dukung2	orang	Maximize	Nilai Posisi Akhir	238.400,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											
SK.05	Tata Kelola Pemerintahan yang baik dilindungi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan											
IKSK.05.15	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Data Dukung1 ✓ Data Dukung2	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.05.16	Nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Data Dukung1 ✓ Data Dukung2	nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.05.17	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenelayanan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 Data Dukung3	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94,00	94,00	133,33	120,00	94,00	133,33	120,00	16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.05.18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Data Dukung1 ✓ Data Dukung2	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	95,00	118,75	80,00	95,00	118,75	16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.05.19	Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Data Dukung1 ✓ Data Dukung2	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											

IKSK.05.20	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Data Dukung1 ✓ Data Dukung2	persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	98,00	0,00			0,00	0,00		16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											
IKSK.05.21	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Data Dukung1 ✓ Data Dukung2 Data Dukung3	indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,30	88,30	88,98	100,77	88,30	88,98	100,77	16-Apr-2024 10:37
	Tambah Data Dukung+											

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan sudah sangat baik. Hal ini ditandai oleh indikator warna hijau pada capaian yang menandakan capaian berada di range 90-<110 berarti cukup (*gambar dashboard kinerjaku*), dan jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun sebelumnya pada periode yang sama (triwulan I), capaian ini jauh lebih baik. Dimana tahun lalu pada periode yang sama memperoleh angka sebesar 76,27%.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pencapaian indikator kinerja sebagaimana pada Bab III, hal – hal yang dapat disarankan untuk perbaikan pengelolaan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator kinerja yang tidak mencapai target :
 - a. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan menyesuaikan anggaran yang sudah dialokasikan pada dokumen perencanaan.
 - b. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan agar mengidentifikasi penyebab – penyebab tidak tercapainya target dan menyusun rencana aksi percepatan kegiatan .
2. Hal – hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenelayan adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja
 - b. Menyusun rencana aksi dan evaluasi rencana aksi per kegiatan secara berkala
 - c. Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala.

**DATA DUKUNG CAPAIAN
& DOKUMEN KEGIATAN**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

MEMORANDUM
NOMOR 288/DJPT.5/RC.610/IV/2024

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Dari : Direktur Perizinan dan Kenelayanan
Hal : Penyampaian Capaian dan Data Dukung Indikator Kinerja Utama (IKU)
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Triwulan I Tahun 2024
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 23 April 2024

Dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Nomor B.1855/DJPT.1/TU.330/IV/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Rapat Pengukuran dan Verifikasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, bersama ini terlampir kami sampaikan hasil capaian dan data dukung indikator kinerja Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Triwulan I Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ukon Ahmad Furkon

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perizinan dan Kenyelayan Triwulan I Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	Kode IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET		CAPAIAN	
			Tahun 2024	Triwulan I	Perentase (%)	
1. Pengelolaan kenyelayan maju dan bersaing	1	Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meringkat kapasitasnya (persen)	40	5,56	13,9	
	2	Persentase nelayan yang memiliki kartu petaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan (persen)	72	66,22	91,97	
	3	Kampung nelayan yang dikembangkan dan difasilitasi penyalangannya melalui program kampung nelayan maju (lokasi)	60			
	4	Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)	10.000	361	3,61	
	5	Persentase nelayan yang terindangi	100	103,3	103,3	
2. Pengelolaan perizinan sesuai ketentuan	6	Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan (Alokasi kapal)	12.000	3.901	32,50	
	7	Dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan serta sertifikasi kuota penangkapan ikan yang diterbitkan (dokumen)	9.000	4.350	48,07	

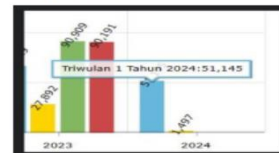
	8	Persentase rekomendasi hasil analisis perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan yang diindikasikan	90	-	-	
	9	Indeks kepatuhan pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (skala nilai)	3	-	-	
	10	Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan (persen)	95	100	95	
	11	Persentase penyelesaian pengaduan terkait aplikasi layanan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan	100	97,05	97,05	
	12	Persentase provinsi yang difasilitasi pelaksanaan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kewenangan Gubernur (persen)	90	91,9	102,11	
3.	Korporasi nelayan yang dikembangkan	13	Kelompok nelayan yang terbentuk menjadi kelembagaan korporasi nelayan (jumlah kelompok)	10	-	-
4.	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan PDK	14	Tenaga kerja yang terlibat pada pengelolaan perizinan dan kenyelayan (orang)	236.400	-	-
5.	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Perizinan dan Kenyelayan	15	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Perizinan dan Kenyelayan (Indeks)	85	-	-
		16	Nilai rekonstruksi kinerja Direktorat Perizinan dan Kenyelayan (nilai)	94	-	-

	17	Persentase unit Direktorat Perizinan dan Kenyelayan yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	94	133,33	141,04	
	18	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perizinan dan Kenyelayannya (persen)	80	95	118,75	
	19	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis Direktorat Perizinan dan Kenyelayan (persen)	80	-	-	
	20	Persentase penyerapan anggaran Direktorat Perizinan dan Kenyelayan (persen)	96	-	-	
	21	Nilai survey Kepuasan Masyarakat lingkup Direktorat Perizinan dan Kenyelayan (indeks)	88,3	88,97	-	

a. SK1 Pengelolaan Kenyelayan maju dan berdaya saing. IKU 1. Persentase Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitasnya



b. SK1 Pengelolaan Kenyelayan maju dan berdaya saing. IKU 2. Persentase Persentase nelayan yang memiliki kartu petaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) bidang penangkapan ikan



Capaian KUSUKA	$\frac{NRK+NTK}{NI} \times 100\%$
NTK	: jumlah nelayan penangkap ikan yang telah memiliki KUSUKA berdasarkan data SATUDATA KRP pada laman https://statistik.kkp.go.id/kusuka-new/dashboard.php (873.592 orang)
NRK	: jumlah nelayan penangkap ikan yang diregistrasi KUSUKA tahun ini
NI	: potensi jumlah seluruh nelayan penangkap ikan di Indonesia berdasarkan data SATUDATA KRP pada laman https://statistik.kkp.go.id/kusuka-new/dashboard.php (1.321.314 orang)
NTK =	873592
NRK =	873592
NI =	1321314
Capaian KUSUKA =	65,99%
	65,208904%

6
Lampiran 3. Memorandum
Nomor : 287/DJPT.S/RC.610/IV/2024
Tanggal : 23 April 2024

c. SK1 Pengelolaan Kerelayanan maju dan berdaya saling IKU 4 Nelayan yang difasilitasi kepemilikan tanahnya melalui program sertifikasi tanah nelayan (orang)

CAPAIAN PENCATATAN KUSUKA PELAKU USAHA VALID

PROFESI	PELAKU USAHA		CAPAIAN PENDATAAN (%)
	KUSUKA	POTENSI	
NELAYAN	871.472	1.321.314	65.95
PEMASAR ANTAR PELABUHAN	5.311	4.013	132.34
PEMASAR IKAN	59.005	275.458	21.42
PEMBUDIDAYA IKAN	564.738	1.355.913	41.65
PENGOLAH IKAN	83.434	64.239	129.88
PETAMBAK GARAM	17.867	22.430	79.66

KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA			
NO.	PROVINSI - KABUPATEN/KOTA	TARGET IDENTIFIKASI TAHUN 2024	CAPAIAN HASIL IDENTIFIKASI 2024
JUMLAH CAPAIAN		10.477	361
1	SUMATERA BARAT	400	0
2	RIAU	305	0
3	LAMPUNG	650	0
4	JAWA BARAT	1300	0
5	JAWA TENGAH	1250	0
6	JAWA TIMUR	1800	361
7	NUSA TENGGARA BARAT	450	0
8	NUSA TENGGARA TIMUR	757	0
9	KALIMANTAN SELATAN	670	0
10	KALIMANTAN TIMUR	200	0
11	SULAWESI TENGAH	1025	0
12	SULAWESI BARAT	65	0
13	SULAWESI TENGGARA	350	0
14	SULAWESI SELATAN	855	0
15	MALUKU UTARA	200	0
16	GORONTALO	300	0
TOTAL		10477	361

Capaian Baknrel :

No.	LOKASI	PERSENTASE	No.	LOKASI	PERSENTASE
1	KAB. MALUKU TENGAH	100%	25	KAB. MALUKU	100%
2	KAB. MALUKU	100%	26	KAB. ACEH TENGAH	100%
3	KAB. MALUKU	100%	27	KAB. ACEH TENGAH	100%
4	KAB. MALUKU	100%	28	KAB. MALUKU	100%
5	KAB. LAMPUNG TIMUR	100%	29	KAB. BANTEN	100%
6	KAB. SUMBAWA	100%	30	KAB. MALUKU	100%
7	KAB. SUMBAWA	100%	31	KAB. MALUKU	100%
8	KAB. KUPANG	100%	32	KAB. MALUKU	100%
9	KAB. BOGOR	100%	33	KAB. PASURUBAN	100%
10	KAB. BOGOR	100%	34	KAB. PASURUBAN	100%
11	KAB. KUPANG	100%	35	KAB. MALUKU	100%
12	KAB. SUMBAWA	100%	36	KAB. MALUKU	100%
13	KAB. SUMBAWA	100%	37	KAB. MALUKU	100%
14	KAB. BOGOR	100%	38	KAB. PASURUBAN	100%
15	KAB. TULUNGAGUNG	100%	39	KAB. PASURUBAN	100%
16	KAB. BANTEN	100%	40	KAB. PASURUBAN	100%
17	KAB. LAMPUNG SELATAN	100%	41	KAB. PASURUBAN	100%
18	KAB. BANTEN	100%	42	KAB. PASURUBAN	100%
19	KAB. PASURUBAN	100%	43	KAB. PASURUBAN	100%
20	KAB. BOGOR	100%	44	KAB. PASURUBAN	100%
21	KAB. BANTEN	100%	45	KAB. PASURUBAN	100%
22	KAB. BANTEN	100%	46	KAB. PASURUBAN	100%
23	KAB. BANTEN	100%	47	KAB. PASURUBAN	100%
24	KAB. PASURUBAN	100%	48	KAB. PASURUBAN	100%
25	KAB. PASURUBAN	100%	49	KAB. PASURUBAN	100%
26	KAB. BOGOR	100%	50	KAB. PASURUBAN	100%
27	KAB. BOGOR	100%	51	KAB. PASURUBAN	100%
28	KAB. BOGOR	100%	52	KAB. PASURUBAN	100%
29	KAB. BOGOR	100%	53	KAB. PASURUBAN	100%
			TOTAL	5400	

Lampiran 5. Memorandum Nomor : 267/DJPT.5/RC.610/V/2024 Tanggal : 23 April 2024

e. SK2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 6. Alokasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan (alokasi kapal).

Table with columns: Kode, Nama, Mekanisme, Tanggal, Status, and other administrative details for various fishing permits.

Table with columns: Kode, Nama, Mekanisme, Tanggal, Status, and other administrative details for various fishing permits, continuing from the previous table.

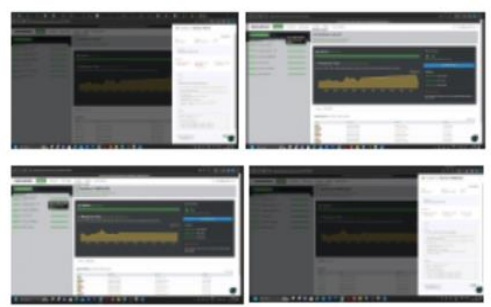
f. SK2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 7. Dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan serta sertifikat kuota penangkapan ikan yang diterbitkan (dokumen)

Table with columns: Kode, Nama, Mekanisme, Tanggal, Status, and other administrative details for fishing permits and quotas.

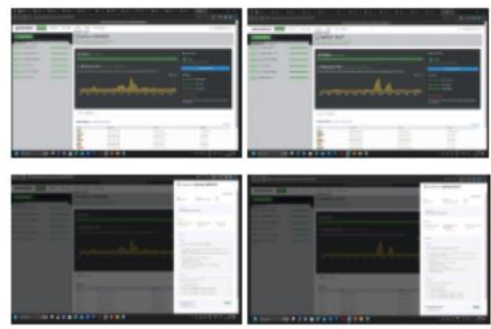
Lampiran 6. Memorandum Nomor : 267/DJPT.5/RC.610/V/2024 Tanggal : 23 April 2024

g. SK2 Pengelolaan Perizinan sesuai ketentuan, IKU 10. Persentase ketersediaan aplikasi layanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

Januari



Februari



Dokumentasi

Kegiatan Korporasi Nelayan



